

WEEKLY REPORT



MARKET DRIVERS

GLOBAL

- **Bank Sentral Amerika atau The Fed akan memperpanjang sejumlah kebijakan fasilitas pinjaman hingga akhir tahun, seiring pemulihan ekonomi akibat dari COVID-19 lebih lambat dari perkiraan awal (29 Juli 2020).** The Fed menyatakan perpanjangan berlaku untuk fasilitas pinjaman yang akan berakhir pada 30 September 2020. Perpanjangan berlaku untuk Fasilitas Kredit Dealer Utama, Fasilitas Likuiditas Reksa Dana Pasar Uang, Fasilitas Kredit Korporasi Pasar Primer, Fasilitas Kredit Korporasi Pasar Sekunder, Fasilitas Pinjaman Efek Beragun Aset, Fasilitas Likuiditas Program Perlindungan *Paycheck*, dan Program Utama Pinjaman Berjalan. Perpanjangan fasilitas ini dilakukan untuk menjaga kredit tetap mengalir ke bisnis dan rumah tangga, serta mencegah dampak jangka Panjang terhadap ekonomi.
- **The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) sebesar 0% hingga 0.25% (29 Juli 2020).** The Fed juga akan tetap mengucurkan stimulus dalam bentuk pembelian obligasi dan efek beragun aset selama beberapa bulan mendatang. The Fed bakal menggunakan instrumen apapun yang dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi. Perbaikan Ekonomi ke depan penuh ketidakpastian dan tergantung dari keberhasilan Pemerintah mengatasi Pandemi. Produk Domestik Bruto Amerika Serikat kemungkinan akan jatuh hingga -34,8% pada kuartal II tahun 2020 seiring dengan *lockdown* di beberapa negara bagian. Akan tetapi, tidak semua sektor kegiatan usaha terpuruk, sektor perumahan misalnya yang masih menunjukkan pertumbuhan.

DOMESTIK

- **Hingga 24 Juli 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp7,85 triliun atau 75,51% (27 Juli 2020).** Dana FLPP tersebut digunakan untuk membiayai 77.401 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010-2020 mencapai Rp52,21 triliun atau sebanyak 733.003 unit rumah. Dari jumlah tersebut, terdapat 13 bank pelaksana yang terdiri dari 3 bank nasional dan 10 BPD yang mencatatkan capaian hingga 80% atau *high level*. Sementara 15 bank pelaksana yang terdiri dari 3 bank nasional dan 12 BPD mencatatkan capaian nilai 50-80% atau *middle level*. Sedangkan sisanya yakni 14 bank pelaksana yang terdiri dari 4 bank nasional dan 10 BPD hanya memperoleh nilai capaian di bawah 50 % atau *low level*. Bank pelaksana dengan realisasi di bawah 50% akan mengalami pengurangan kuota minimal sebesar 20%. Sementara penambahan kuota hanya dapat dilakukan jika bank sudah mampu menyalurkan dana FLPP di atas 80%.
- **Pemerintah menyiapkan dana Rp20 triliun untuk ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) (27 Juli 2020).** Penempatan dana ini dilaksanakan berdasarkan PMK No 70 tahun 2020 yang sebelumnya dilakukan pada Bank Himbara sebesar Rp30 triliun. Penempatan dana tersebut diharapkan bisa disalurkan ke UMKM hingga dua kalinya atau Rp40 triliun untuk mendukung upaya program PEN. Suku bunga penempatan dana pemerintah ini sama dengan yang diberikan pada bank Himbara yaitu 80% dari suku bunga repo bank Indonesia. BPD yang sudah ditetapkan menerima penempatan dana Pemerintah yaitu Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp2,5 triliun, Bank DKI sebesar Rp2 triliun, Bank Jateng sebesar Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan Bank Sulawesi Utara-Gorontalo (Bank SulutGo) sebesar Rp1 triliun. sementara 2 BPD lainnya masih dalam pengkajian yaitu BPD Bali sebesar Rp1 triliun dan BPD DIY sebesar Rp1 triliun. Penempatan dana pada BPD diharapkan dapat

Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

mendorong perekonomian di daerah dan dana tersebut disalurkan pada kredit sektor-sektor yang produktif.



- **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mengajukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat untuk pemulihan kegiatan ekonomi (27 Juli 2020).** Pinjaman yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun dan Pemprov Jawa Barat senilai Rp4 triliun. Pinjaman yang diajukan DKI Jakarta terbagi menjadi dua yakni untuk tahun 2020 sebesar Rp4,5 triliun dan sisanya Rp8 triliun untuk tahun 2021, sedangkan yang diajukan oleh Jawa Barat sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2020 dan Rp2,09 triliun untuk tahun 2021. Ekonomi DKI Jakarta dan Jawa Barat berkontraksi cukup dalam dan Pendapatan asli daerah turun hingga 54% dan 16,7%. Ada beberapa relaksasi dalam pengaturan kebijakan pemerintah daerah ini antara lain bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun dan dapat dituangkan dalam APBD.
- **Hingga 22 Juli 2020, Kementerian BUMN mencatat Bank Himbara telah menyalurkan kredit baru sebesar Rp43,5 Triliun atau setara dengan 145% penempatan dana pemerintah di Bank Himbara (28 Juli 2020).** Penyaluran kredit tersebut telah menjangkau 518.797 debitur. Hal ini sejalan dengan arahan Pemerintah untuk melakukan *leverage* sebanyak tiga kali dari dana yang ditempatkan yaitu Rp90 triliun selama 3 bulan. Bank BRI telah menyalurkan Rp21 triliun dari penempatan dana Rp10 triliun, Bank Mandiri sudah menyalurkan hampir Rp15 triliun dari penempatan dana Rp10 triliun, Bank BNI sudah menyalurkan Rp6 triliun dari penempatan dana Rp5 triliun, dan Bank BTN sudah menyalurkan Rp3 triliun dari penempatan dana Rp5 triliun.
- **Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperlebar defisit APBN terhadap PDB tahun 2021 sebesar 5,2% (28 Juni 2020).** Defisit tersebut lebih tinggi dari desain awal yang disepakati Kementerian Keuangan dan DPR sebesar 4,7% dari PDB. Dengan pelebaran defisit tersebut, Pemerintah memiliki cadangan tambahan belanja untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp179 triliun. Dengan cadangan tambahan belanja tersebut, Pemerintah akan memprioritaskan program untuk ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, serta memperkuat kualitas konektivitas di seluruh Indonesia. Selain itu juga untuk program pendidikan dan kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19 di tahun 2021 serta dukungan terhadap produk vaksin.
- **Bank-Bank Himbara telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM dan korporasi pada kuartal II tahun 2020 dengan nilai kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp441 triliun dari 3,7 juta debitur (28 Juli 2020).** Restrukturisasi yang diberikan berupa penundaan pembayaran pokok, pembayaran bunga, hingga penurunan bunga. Pelaksanaan restrukturisasi kredit ini merespons kebijakan POJK No 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.
- **Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) menyatakan saat ini hunian dengan harga di bawah Rp1 Miliar masih diminati di pasar properti tanah air di masa pandemi (28 Juli 2020).** Penjualan rumah dengan harga berkisar Rp600 juta – Rp1 miliar masih diminati oleh *end user* dan kaum milenial. Pengembang disarankan fokus menjual properti di bawah harga Rp1 miliar selama masa pandemi. Untuk menarik minat konsumen, pengembang dapat menerapkan beberapa kemudahan untuk konsumen seperti kemudahan cara pembayaran, meringankan harga cicilan, hingga memberikan harga promosi. Sektor properti diprediksi perlahan mulai pulih di kuartal III dan IV tahun 2020 walaupun hingga akhir tahun penjualan properti masih turun hingga 50% dikarenakan penjualan kuartal II yang terkoreksi sangat dalam.

Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

- **Pemerintah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja (KMK) bagi pelaku usaha korporasi padat karya guna mendukung upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (29 Juli 2020).** Besaran kredit modal kerja yang ditarget program ini mencapai Rp100 triliun hingga akhir 2021 dengan menunjuk 15 bank sebagai penyalur. Penyaluran penjaminan kredit modal kerja dilakukan melalui dua *special mission vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Ia mengatakan, kredit modal kerja yang akan mendapatkan penjaminan ini adalah kredit dengan plafon Rp10 miliar hingga Rp1 triliun. Penjaminan terutama diarahkan pada sektor-sektor padat karya mengingat efek pengganggannya yang besar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja untuk menghindari aksi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor padat karya seperti sektor pariwisata seperti hotel dan restoran, otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 sangat berat. Skema penjaminan kredit untuk sektor prioritas akan lebih besar, yakni 80% dijamin pemerintah dan 20% oleh perbankan. Secara umum, skema penjaminan kredit modal kerja korporasi dijamin 60% oleh pemerintah dan 40% oleh perbankan. Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun. Kriteria untuk mendapat penjaminan ini adalah untuk korporasi padat karya yang pinjamannya antara Rp10 miliar hingga Rp1 triliun, perusahaan membuktikan aktivitas bisnisnya turun, memiliki karyawan di atas 300 orang, multiplier tinggi, memiliki dokumen rencana penggunaan anggaran untuk daya tahan perusahaan maupun ekspansi. Selain itu, pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

- **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps, sehingga menjadi 5,25% dan 7,75% (29 Juli 2020).** Sedangkan untuk tingkat bunga penjaminan simpaan valuta asing di Bank Umum dipertahankan tetap 1,50%. Pemangkasan tingkat suku bunga tersebut berlaku sejak 30 Juli 2020 hingga 30 September 2020. Kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan simpanan tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan terkini suku bunga pasar simpanan dan kondisi likuiditas perbankan. Selain itu, kinerja beberapa indikator perekonomian serta mempertimbangkan prospek stabilitas sistem keuangan.

- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memutuskan hasil evaluasi mengenai rencana perpanjangan POJK NO 11 Tahun 2020 pada Oktober mendatang (29 Juli 2020).** Saat ini, OJK masih mengumpulkan data sebelum memutuskan perpanjangan program restrukturisasi kredit. Adapun hingga 13 Juli 2020, total kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp776,99 triliun kepada 6,75 juta debitur dari 100 bank. Di mana debitur (UMKM) sebesar Rp328,68 triliun sebanyak 5,43 juta debitur, sedangkan non-UMKM mencapai Rp 448,32 triliun dari 1,32 juta debitur. Potensi kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp1.369 triliun dari 15,24 juta debitur. Jika dirinci, debitur UMKM sebanyak 12,69 juta debitur dengan baki debet Rp558,73 triliun, sementara segmen non-UMKM sebanyak 2,55 juta debitur dengan baki debet mencapai Rp811,2 triliun. Menurut OJK, dengan adanya perpanjangan beleid tersebut akan memberikan keyakinan kepada perbankan maupun industri keuangan lainnya supaya bisa memiliki keleluasaan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan kredit.

Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

MARKET IMPACTS

- Dari Indikator Pasar keuangan Indonesia di Tabel 2, dapat kita lihat bahwa terjadi penguatan kondisi dalam satu minggu terakhir:**
 - IHSG menguat sebesar 1,31% dalam seminggu terakhir**, yaitu dari 5.083 ke 5.150. Sehingga jika dibandingkan akhir tahun 2019 penurunannya lebih rendah yaitu menjadi -18,25% ytd. Perkiraan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami perbaikan di semester II 2020 sedikit banyak mempengaruhi kinerja pasar saham.
 - Dalam satu minggu terakhir, **Rupiah terapresiasi sebesar 0,07%**, yaitu dari Rp14.610 per USD menjadi Rp 14.600 per USD. Jika dibandingkan dengan akhir 2019 juga masih terdepresiasi, yaitu sebesar -5,29% ytd. Apresiasi rupiah selama satu minggu ini disebabkan antara lain oleh Premi CDS Indonesia 5 tahun yang menguat ke level 118,10 bps serta yield SBN Rupiah 10 tahun yang terus turun ke posisi 6,79%.
 - Yield SBN Rupiah 10 tahun turun sebesar 6 bps dalam satu minggu terakhir menjadi 6,79%**. Posisi ini 25 bps lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2019 yang sebesar 7,04%. Sementara yield SBN USD 10 tahun turun 23 bps dalam seminggu terakhir, dan jika dibandingkan akhir tahun 2019 posisinya jauh lebih rendah, yaitu sudah turun 71 bps menjadi 2,18% dibandingkan 2,89% pada akhir 2019.

Tabel 1. Perubahan Beberapa Indikator Pasar

Perubahan Year-to-Date 30 Juli 2020								
Nilai Tukar	Saham	Obligasi Pemerintah 10Y			Komoditi			
		Negara	Yield	Yield Change				
EUR	4,64%	CCMP	17,50%	USA	0,55%	-136	Gold	28,8%
JPY	3,19%	SHCOMP	7,76%	India	5,83%	-73	Rice	27,1%
PHP	2,97%	FBMKLCI	0,94%	Russia	5,90%	-46	Nickel	-1,1%
CNY	-0,63%	SPX	0,86%	Italy	0,97%	-44	Aluminium	-4,7%
DXY	-2,87%	MXAPJ	0,14%	Germany	-0,53%	-34	Natural Gas	-7,0%
MYR	-3,67%	NKY	-5,57%	Thailand	1,22%	-25	CPO	-8,5%
IDR	-5,29%	SENSEX	-8,42%	Indonesia	6,79%	-25	Rubber	-14,1%
THB	-5,89%	IBOV	-8,68%	China	2,93%	-21	Coal	-23,5%
RUB	-18,68%	SET	-16,84%	Brazil	6,77%	-2	WTI	-33,4%
BRL	-28,44%	JCI	-18,25%	Japan	0,01%	3	Brent	-36,3%

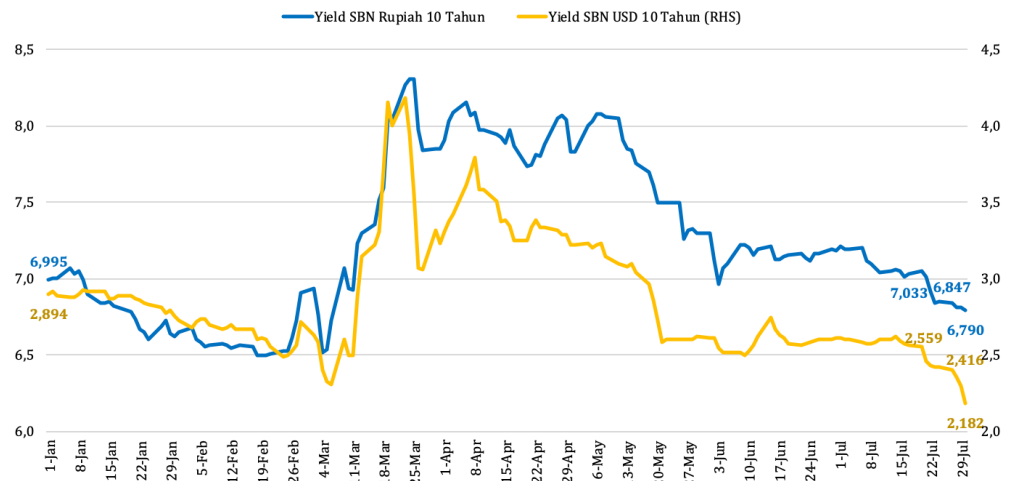
Sumber : Bloomberg

Tabel 2. Indikator Pasar Keuangan Indonesia Membaik Dalam Seminggu Terakhir

	30-Jul-20	24-Jul-20	Jun-20	Dec-19	17-24 Jul (wow)	Jun-24 Jul (mtd)	Dec19-24 Jul (ytd)
IHSG	5.150	5.083	4.905	6.300	1,31%	4,98%	-18,25%
Rupiah	14.600	14.610	14.265	13.866	0,07%	-2,35%	-5,29%
10Y Rupiah bond yield	6,79	6,85	7,18	7,04	-6 bps	-39 bps	-25 bps
10Y USD bond yield	2,18	2,42	2,61	2,89	-23 bps	-43 bps	-71 bps
CDS Indo 5Y	118,10	118,24	133,60	67,72	0 bps	-15 bps	50 bps

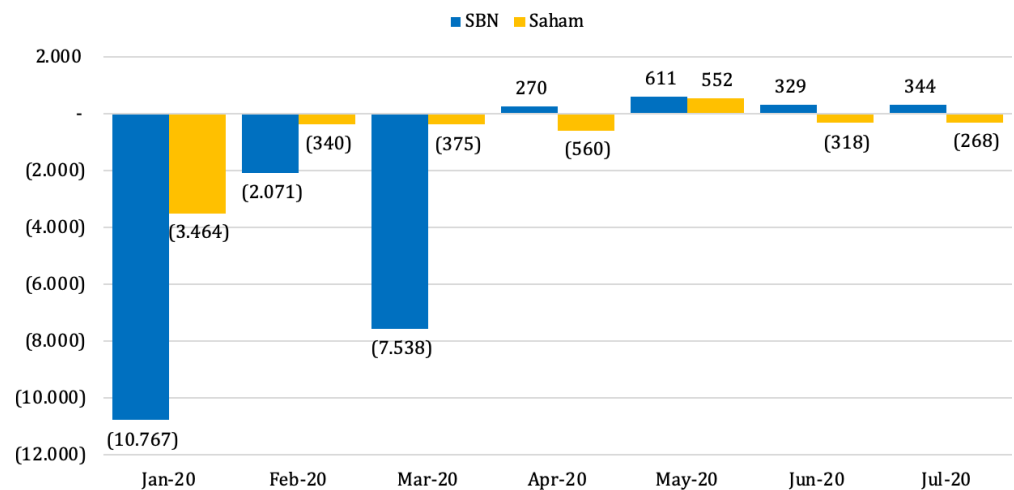
Sumber : Bloomberg

Grafik 1. Perkembangan Yield SBN Rupiah dan Valas 10 Tahun (%)



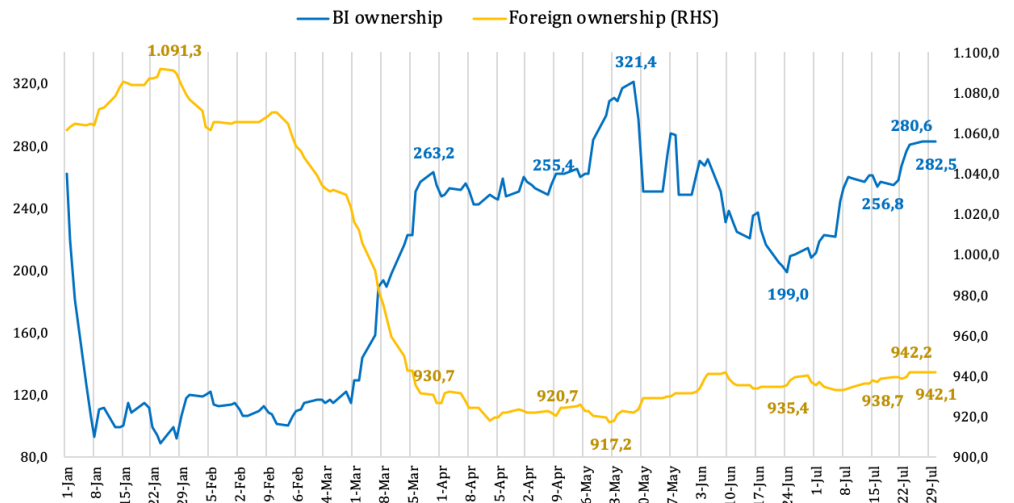
Sumber : Bloomberg

Grafik 2. Net Buy/Sell Investor Asing di SBN dan Saham (USD juta) s.d 30 Juli 2020



Sumber : Bloomberg

Grafik 3. Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan Investor Asing



Sumber : Bloomberg

Winang Budoyo
Chief Economist

Investor Relations & Research Division
PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16
Jl. Gajah Mada No. 1,
Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

Grafik 4. Rupiah kembali menguat karena DXY melemah



Sumber : Bloomberg

Grafik 5. Perkembangan Premi CDS Indonesia 5 Tahun



Sumber : Bloomberg

Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division

PT Bank Tabungan Negara

(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16

Jl. Gajah Mada No. 1,

Jakarta 10130

Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.